

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam teori akuntansi dan organisasi, pengendalian intern atau kontrol internal diartikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia dan Sistem Teknologi Informasi yang tersedia dan dirancang untuk membantu organisasi dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian Intern adalah suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur efektivitas kinerja suatu organisasi untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Ia berperan dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan atas sumber daya organisasi.

Sama halnya dengan organisasi pada umumnya, di dalam organisasi pemerintah juga terdapat pengendalian intern yang tugas dan fungsinya tidak jauh berbeda dengan tugas pengendali intern yang ada di dalam organisasi pada umumnya. Di dalam organisasi pemerintah ada beberapa unit lembaga yang dibentuk sebagai pengendali intern untuk memonitoring jalannya roda pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, Inspektorat Jenderal untuk tiap-tiap kementerian yang bertanggung jawab terhadap Menteri terkait, serta Unit Kepatuhan Internal lainnya.

Kementerian Keuangan adalah salah satu unit organisasi pemerintah yang memiliki visi "Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara yang Dipercaya dan Akuntabel untuk Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan" juga memiliki unit Eselon I yang berperan sebagai

Unit Kontrol Intenal untuk Kementerian Keuangan. Unit Kontrol Internal ini disebut sebagai Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Dalam menjalankan tugasnya, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan memiliki tugas untuk mewujudkan serta meningkatkan kepercayaan publik.

Untuk menjalankan tugasnya sebagai pengendali intern Kementerian Keuangan, Inspektorat Jenderal sering malakukan perjalanan dinas agar dapat melihat langsung kondisi dan permasalahan dilapangan. Oleh karena itu, perjalanan dinas merupakan bagian yang tidak bisa dihindari oleh Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugasnya. Perjalanan dinas rutin dilakukan sesuai dengan perencanaan kegiatan pengawasan yang telah disusun sebelumnya. Pada saat melakukan perjalanan dinas, ketersediaan dana merupakan hal yang sangat penting demi menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Untuk menjamin ketersediaan dana tersebut, maka diperlukan suatu sistem yang baik dan efektif dalam perencanaan, pengelolaan, serta pertanggungjawaban anggaran. Selain itu, untuk memenuhi biaya perjalanan dinas juga diperlukan kerja sama yang baik antara pihak dan pengguna dana. Sistem tata kelola anggaran yang baik akan menjamin terciptanya penggunaan anggaran yang efektif, efisien, serta akuntabel dan diharapkan mampu menghindari terjadinya penyalahgunaan anggaran.

Biaya perjalanan dinas dewasa ini juga sering mendapat sorotan masyarakat. Karena, selain menghabiskan banyak uang negara, perjalanan dinas juga sangat rentan terhadap penyelewengan. Banyak modus operandi yang sering digunakan dalam melakukan penyelewengan terhadap biaya perjalanan dinas. Hal ini menuntut adanya suatu sistem pengendalian yang tepat dalam mencegah terjadinya penyelewengan tersebut. Oleh sebab itu, selama menjalani kegiatan

magang di Inspektorat Jenderal, penulis ingin menggali informasi terkait dengan biaya perjalanan dinas tersebut dengan mengangkat sebuah tema "*Implementasi Prosedur Pengelolaan Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan*"

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Dalam penulisan laporan praktek kerja magang ini, adapun masalah-masalah yang diangkat penulis sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kegiatan yang memerlukan biaya perjalanan dinas pada Inspektorat Jenderal;
2. Hal-hal yang harus dipersiapkan dan/atau dilakukan terkait biaya perjalanan dinas pada saat akan melakukan perjalanan dinas;
3. Hal-hal yang harus dilakukan terkait biaya perjalanan dinas pada saat perjalanan dinas selesai;
4. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam rangka melaksanakan kegiatan perjalanan dinas;
5. Kemungkinan terjadinya penyalahgunaan biaya perjalanan dinas;
6. Sistem pengendalian yang ada pada Inspektorat Jenderal terkait penggunaan biaya perjalanan dinas.

1.3. TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan yang diharapkan penulis dalam penulisan laporan praktek kerja ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan mendapatkan ilmu baru tentang perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan;
2. Mengetahui hambatan-hambatan yang mungkin terjadi dalam perencanaan, penggunaan, serta pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas;
3. Mengetahui sistem pengendali yang ada pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dalam kaitannya dengan biaya perjalanan dinas;
4. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI).

1.4. METODE RISET

Dalam menyusun laporan praktek kerja magang ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data. Metode ini dipilih sesuai dengan tujuan dari pengumpulan data tersebut.

1. Observasi Lapangan

Observasi Lapangan dilakukan penulis dengan melakukan pengamatan langsung di tempat Praktik Kerja Magang yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dengan cara ikut serta dalam melakukan suatu kegiatan tertentu. Pengamatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang sering timbul berkaitan dengan materi yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Praktik Magang.

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan ini kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi, terutama untuk penyusunan laporan praktik kerja lapangan. Dengan mempertimbangkan kesulitan yang akan dihadapi di lapangan, maka dapat dilakukan perubahan prioritas metode pengumpulan data. Prioritas tersebut akan disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan, agar penulis mendapatkan data yang akurat tentang objek analisis.

2. Wawancara

Metode wawancara dilakukan oleh penulis dengan cara mengajukan pertanyaan kepada pihak-pihak terkait yang ada di dalam kantor Inspektorat Jenderal yang sekiranya mempunyai atau mengetahui informasi maupun data yang akurat yang diperlukan dalam penyusunan laporan praktik kerja magang ini. Wawancara yang penulis lakukan bersifat informal, biasanya dilakukan bersama rekan kerja, atasan langsung, dan pihak-pihak terkait.

3. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Reserch*)

Metode Penelitian Kepustakaan adalah suatu metode yang dilakukan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dan informasi dengan cara mengumpulkan, mempelajari, serta membandingkan sumber-sumber tertulis. Sumber-sumber ini berupa Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Inspektorat Jenderal, Surat Edaran, buku-buku, tulisan-tulisan, serta literatur-literatur yang mendukung penyusunan Laporan Praktik Kerja Magang ini. Metode ini dilakukan guna memperoleh pengertian dasar, landasan teori, dan konsep yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada.

1.5.Lokasi dan Waktu

Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan pada hari dan jam kerja terhitung mulai tanggal 1 s.d. 30 Juni 2012 di Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin, Nomor: 1, Gd. Juanda II Lt. IV-XIII Jakarta Pusat.